

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>PROVINSI SUMATERA UTARA<br>DINAS PENDAPATAN<br>SEKRETARIAT  | NOMOR SOP   | : SOP/XIX.A.b.3/DISPENDA/2014   |
|  | TANGGAL PEMBUATAN   | : 14 MARET 2014   |
|  | TANGGAL REVISI  | :   |
|  | TANGGAL EFEKTIF   | : 31 Oktober 2014   |
|  | DISAHKAN OLEH   | : <b>SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN PROVSU</b><br><br><b>HALINA, SH</b><br><b>PEMBINA TK. I</b><br><b>NIP. 19581225 198503 2 004</b> |
| NAMA SOP   | : <b>Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)</b>   |   |
| <b>DASAR HUKUM :</b>   | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>  |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>3. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 pada DIKTUM KETIGA tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</li> <li>9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Kemampuan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>2. Memiliki Kemampuan Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan</li> </ol> |   |
| <b>KETERKAITAN :</b>   | <b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>   |   |
| 1. SOP Penerbitan SPM  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/ Laptop dan printer</li> <li>2. Kalkulator</li> <li>3. ATK</li> <li>4. DPA/DPPA</li> </ol>   |   |
| <b>PERINGATAN :</b>  | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>   |   |
| Jika SOP Penerbitan SPP tidak dibuat maka SPM tidak akan diterbitkan   | Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy   |   |